

Implementasi Program Rehabilitasi Ekosistem Mangrove di Kecamatan Tugu Kota Semarang

Oleh :

Debby Rinata Abadi, Ari Subowo, Aufarul Marom*)

**Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The Program of Rehabilitation Mangrove Ecosystem Tugu Sub – District, Semarang City is due to by the high levels of abrasion that occurs in coastal areas and has an impact on society who live there. Therefore, the Department of Marine and Fisheries of Semarang City try to repair the condition of coastal areas by doing Rehabilitation Mangrove Ecosystem. This policy based on Law No.32/2009, Regulation of Semarang District No.7/2010, and Regulation of Semarang District No.14/2011.

The purpose of this study is investigate the process implementation and the factors that affect its. The purpose can be achieved if the process implementation following the Riant Nugroho's criteria that is the accuracy of the policy, the accuracy of the implementation, the accuracy of target, the accuracy of environment and the accuracy of process. The implementation of Rehabilitation Mangrove Ecosystem influenced of supporting and inhibiting factors. Based on the theory of George C. Edwards III that supporting and inhibiting factors such as communication, bureaucratic structure, resources and attitudes.

The results of this study show that the Department of Marine and Fisheries of Semarang City having ready for the implementation of Rehabilitation Mangrove Ecosystem. However, the implementation of Rehabilitation Mangrove Ecosystem is not well implemented.. There are several factors such as (1) the limitation financial resources and implementer official (2) the unavailability of technical guidelines (SOP) for the implementation and (3) the lack of monitoring for ecosystem that has been rehabilitated (4) the utilization KKMKS forum is minimal.

Keywords : mangrove , implementation , supporting factors , inhibiting factors

A. PENDAHULUAN

Masyarakat pesisir di Kota Semarang dihadapkan oleh berbagai permasalahan dimana salah satunya adalah tingginya tingkat abrasi yang terjadi sehingga dapat mengancam keberadaan dan kehidupan mereka. Tingkat abrasi yang semakin tinggi menyebabkan hilangnya daratan- daratan di sekitar bibir pantai sehingga tambak-

tambak milik warga juga menghilang karena abrasi. Abrasi yang semakin tinggi juga mengakibatkan warga khawatir akan laut yang semakin mendekati tempat tinggal mereka.

Melihat permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir maka Pemerintah Kota Semarang membuat kebijakan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan abrasi di wilayah pesisir melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang dengan mengadakan Program Rehabilitasi Ekosistem Mangrove. Program ini bertujuan untuk pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi mangrove yang telah rusak walaupun hasilnya berbeda dari kondisi semula.

Mangrove adalah sekelompok tumbuhan, terutama golongan halofil yang terdiri dari beragam jenis, dari suku tumbuhan yang berbeda- beda tetapi memiliki kesamaan adaptasi morfologi dan fisiologi terhadap habitat tumbuhannya dan genangan pasang surut air laut yang mempengaruhinya (Saputro dalam Kordi K, 2012:11). Segala tumbuhan dalam hutan mangrove saling berinteraksi dengan lingkungannya baik yang bersifat biotik maupun abiotik yang saling bergantung disebut ekosistem mangrove. Ekosistem mangrove memiliki fungsi mengurangi laju abrasi pada pesisir pantai.

Dalam kurun waktu 1999- 2004 terjadi perubahan signifikan mengenai luas lahan yang terjadi di Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Tugu dan Kecamatan Genuk. Perubahan ini terjadi karena akresi yang luasnya mencapai 67, 05 ha dan abrasi yang luasnya mencapai 731, 33 ha. Namun, karena akresi dan abrasi yang tidak seimbang maka lebih banyak lahan yang berkurang. Berdasarkan hasil penghitungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang pada tahun 2006 panjang garis pantai Kota Semarang berdasarkan standar garis lurus Kota Semarang adalah 22, 71 km dan panjang pantai sesuai lekuk wilayah adalah 27, 28 km. Namun, berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan pada tahun 2010 diketahui panjang garis pantai Kota Semarang sepanjang 16, 50 km dan panjang garis pantai berdasarkan lekuk wilayah pantai sepanjang 36, 60 km.

Pelaksanaan Program Rehabilitasi Ekosistem Mangrove diharapkan mampu mengatasi permasalahan abrasi wilayah pesisir yang dialami oleh masyarakat pesisir. Selain itu, program ini juga memiliki tujuan untuk mengembalikan ekosistem mangrove yang telah rusak. Berbagai kegiatan dirancang untuk mendukung program ini antara lain penanaman bibit mangrove, pembuatan alat pemecah ombak (APO), pembangunan sabuk pantai dan sosialisasi kepada masyarakat. Pada implementasinya, pelaksanaan kegiatan- kegiatan pada program ini dalam rangka mencapai tujuannya tentu tidaklah mudah dimana terdapat berbagai faktor pendorong maupun penghambat yang dapat mempengaruhi.

B. TUJUAN

1. Mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi Program Rehabilitasi Ekosistem Mangrove di Kecamatan Tugu.

2. Menganalisis faktor pendorong dan penghambat dalam implementasi Program Rehabilitasi Ekosistem Mangrove di Kecamatan Tugu.

C. TEORI

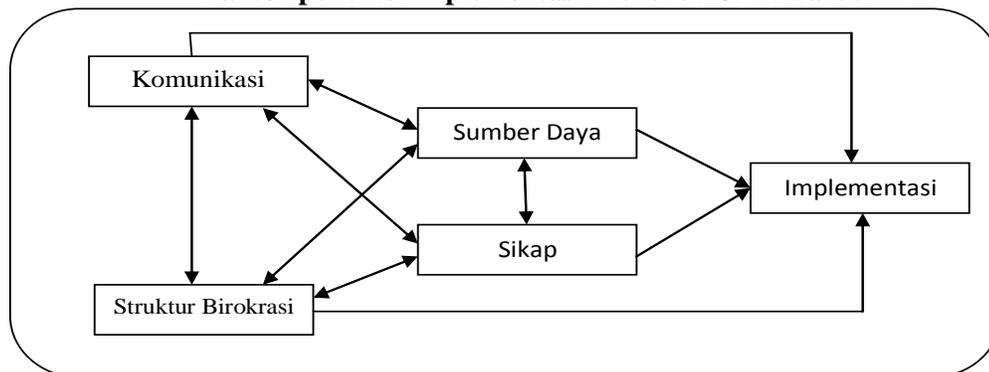
Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan menurut Lester dan Stewart dalam Kusumanegara (2010: 97) mendefinisikan implementasi adalah sebuah tahapan yang dilakukan setelah aturan hukum ditetapkan melalui proses politik. Pendapat lain mengenai implementasi menurut Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2005: 65) merumuskan proses implementasi sebagai tindakan- tindakan yang dilakukan baik oleh individu- individu/ pejabat- pejabat atau kelompok- kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan- tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Pengukuran efektifitas implementasi kebijakan publik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan dalam Program Rehabilitasi Ekosistem Mangrove adalah melalui prinsip- prinsip yang dikemukakan oleh Riant Nugroho. Riant Nugroho (2012: 650) mengemukakan mengenai prinsip- prinsip yang tidak dapat diabaikan dalam implementasi kebijakan publik. Prinsip- prinsip tersebut adalah ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, ketepatan lingkungan dan ketepatan proses.

Keberhasilan implementasi akan ditentukan oleh banyak faktor, masing- masing faktor tersebut akan berhubungan satu sama lain. Dalam penelitian Implementasi Rehabilitasi Ekosistem Mangrove di Kecamatan Tugu Kota Semarang menggunakan model George C. Edwards III. Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain.

Faktor penentu Implementasi Menurut C. Edwards III



Sumber: George C. Edwards III dalam Subarsono (2010: 91)

D. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan jenis penelitian yang dipilih adalah deskriptif. Desain penelitian yang digunakan adalah

penelitian implementasi dengan pendekatan model George C. Edwards III. Fokus penelitian yaitu Implementasi Program Rehabilitasi Ekosistem Mangrove di Kota Semarang. Di dalam melakukan penelitian mengenai Program Rehabilitasi Ekosistem Mangrove, peneliti mengambil situs penelitian ini di Kecamatan Tugu Kota Semarang serta Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang dikarenakan wilayah ini merupakan wilayah pesisir yang paling banyak mengalami abrasi dan memiliki luas ideal mangrove yang jauh dari target serta Dinas Kelautan dan Perikanan banyak melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Program Rehabilitasi Ekosistem Mangrove di kecamatan ini. Sedangkan, Dinas Kelautan dan Perikanan dipilih karena memiliki tugas urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Semarang di bidang kelautan yang masih ada dalam wilayah teritorial Kota Semarang dan masalah potensi perikanan yang ada di Kota Semarang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini adalah menggunakan *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling* yang merupakan teknik pengambilan sample dengan pertimbangan orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, foto, data statistik dan lain- lain. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka.

Pendekatan analisis data yang ditempuh dalam menganalisis data adalah pendekatan *emik* yaitu pendapat informan yang selanjutnya dianalisis secara sistematis dengan melakukan tiga langkah secara bersamaan yaitu reduksi data, display data, dan mengambil kesimpulan/ verifikasi. Artinya data-data yang terdiri dari deskripsi dan uraiannya adalah data yang dikumpulkan, kemudian disusun pengertian dengan pemahaman arti yang disebut reduksi data, kemudian diikuti penyusunan sajian data yang berupa cerita sistematis, selanjutnya dilakukan usaha untuk menarik kesimpulan dengan verifikasinya berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data. Kualitas atau keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain (Moleong,2012:330). Teknik triangulasi yang digunakan antara lain triangulasi sumber yang dilakukan dengan cara membandingkan wawancara antara informan satu dengan informan lainnya dan dengan suatu dokumen yang berkaitan.

E. PEMBAHASAN

1. Proses Implementasi Program Rehabilitasi Ekosistem Mangrove di Kecamatan Tugu Kota Semarang

a. Ketepatan Kebijakan

Dilihat dari aspek ketepatan kebijakan, Program Rehabilitasi Ekosistem Maangrove di Kecamatan Tugu Kota Semarang memiliki tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh masyarakat pesisir. Program ini mendukung pengelolaan kawasan rawan abrasi di Kecamatan Tugu, Kota Semarang, pelestarian

kawasan pantai berhutan bakau/ mangrove yang ada di pesisir pantai Kota Semarang khususnya di Kecamatan Tugu sesuai dengan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Program Rehabilitasi Ekosistem Mangrove dengan melibatkan masyarakat pada pelestarian ekosistem mangrove. Program Rehabilitasi Ekosistem Mangrove merupakan sebuah program yang dapat memfasilitasi masyarakat untuk ikut serta dalam melestarikan ekosistem mangrove khususnya masyarakat yang ada di Kecamatan Tugu. Dampak negatif akibat berkurangnya ekosistem mangrove serta manfaat ekonomi yang didapatkan oleh masyarakat didapat dari berbagai macam bagian mangrove yang dapat dimanfaatkan menjadi berbagai macam olahan makanan, tinta, lingkungan yang baik untuk mengembangkan berbagai macam biota dan lain- lain. Program Rehabilitasi Ekosistem Mangrove memang dirasakan banyak pihak tepat untuk dilaksanakan. Namun, pada proses pelaksanaannya masih ditemui permasalahan- permasalahan sehingga hasilnya masih belum optimal. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih tingginya tingkat abrasi yang terjadi di wilayah- wilayah tepi pantai Kota Semarang dibandingkan tingkat akresinya. Menurut data statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang, wilayah pesisir yang terkena abrasi/erosi mencapai 731,03 ha sedangkan mengalami akresi 67,05 ha.

b. Ketepatan Pelaksanaan

Ketepatan pelaksanaan dilihat pada ketepatan lembaga pelaksana kebijakan yang diberi wewenang untuk menjalankan kebijakan tersebut. Program Rehabilitasi Ekosistem Mangrove merupakan kebijakan yang dirumuskan secara *top-down* sehingga tidak mungkin terlepas dari peran pemerintah dalam pelaksanaannya. Lembaga- lembaga pemerintahan yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan program ini antara lain Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang bertugas merencanakan pemanfaatan, pengendalian wilayah pesisir, menyiapkan pencegahan kerusakan wilayah pesisir dan laut; Dinas Pertanian Kota Semarang bertugas menangani kelastarian hutan dan ekosistem mangrove di wilayah pesisir; Badan Lingkungan Hidup bertugas menangani pencemaran di wilayah pesisir dan laut; dan Kelurahan bertugas mendukung dan memberi bantuan administrasi yang dibutuhkan warga berkaitan dengan kegiatan mangrove. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang dalam Program Rehabilitasi Ekosistem Mangrove adalah mengkoordinasikan lembaga- lembaga tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan. Bagi para informan lembaga- lembaga yang menangani Program Rehabilitasi Ekosistem Mangrove sudah tepat dan sudah menjalankan tugas yang diamanatkan dalam Peraturan Walikota dengan cukup baik serta pembagian tugas dan fungsi sudah jelas pada masing- masing lembaga.

c. Ketepatan Target

Target yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam program ini tidak sesuai dengan lembaga- lembaga tersebut. Lembaga- lembaga tersebut belum memahami target yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam program ini. Kesiapan target saat awal dilaksanakan Program

Rehabilitasi Ekosistem Mangrove di Kecamatan Tugu, Kota Semarang sebagian besar tidak siap dan tidak menerima adanya program ini. Seiring dengan kerusakan lingkungan yang terjadi di pesisir pantai Kota Semarang yang disebabkan adanya global warming serta banyaknya ekosistem mangrove yang rusak menyebabkan berbagai dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini mendorong dan meningkatkan kesiapan masyarakat untuk melaksanakan program ini. Saat ini masyarakat sudah siap dalam melaksanakan program ini, terbukti dengan hasil temuan di lapangan telah banyak kelompok- kelompok masyarakat mangrove yang terbentuk dengan inisiatif masyarakat sendiri yang dibimbing oleh dinas terkait.

d. Ketepatan Lingkungan

Lingkungan endogen yaitu interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan yang terkait. Lembaga- lembaga yang ikut melaksanakan Program Rehabilitasi Ekosistem Mangrove tergabung dalam Kelompok Kerja Mangrove Kota Semarang (KKMKS). Lembaga yang ikut tergabung dalam forum KKMKS tidak hanya lembaga pemerintahan namun juga lembaga swadaya masyarakat, akademisi, serta masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap ekosistem mangrove. Namun, disayangkan belum ada instansi swasta yang ikut bergabung dalam forum ini, padahal banyak instansi swasta dan BUMN yang memiliki program Corporate Respon Responsibility (CSR) dalam bidang lingkungan terutama ekosistem mangrove. lingkungan eksogen yaitu berkenaan dengan persepsi atau pendapat publik terkait dengan Program Rehabilitasi Ekosistem Mangrove di Kecamatan Tugu. Publik memiliki persepsi atau pendapat yang positif terkait adanya Program Rehabilitasi Ekosistem Mangrove. Hal ini disebabkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian ekosistem mangrove. Peningkatan kesadaran masyarakat disebabkan manfaat mangrove yang sudah dirasakan bersama oleh masyarakat yang ada di pesisir mangrove Kota Semarang termasuk masyarakat pesisir Kecamatan Tugu.

e. Ketepatan Proses

Masyarakat memahami kebijakan ini sebagai sebuah aturan yang harus diperlukan untuk masa depan terbukti dengan adanya kesediaan masyarakat menerima Program Rehabilitasi Ekosistem Mangrove dengan mengizinkan sekitar tambaknya digunakan sebagai lahan untuk menanam pohon mangrove. Sedangkan di sisi lain pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang memahami bahwa Program Rehabilitasi Ekosistem Mangrove sebagai tugas yang harus dilaksanakan sebagai seorang abdi negara yang memiliki tugas yang fungsi yang telah diembannya. Tahap selanjutnya, masyarakat tidak hanya memahami adanya Program Rehabilitasi Ekosistem Mangrove, akan tetapi menerima Program Rehabilitasi Ekosistem Mangrove dengan mulai ikut serta dalam penanaman pohon mangrove, menghadiri sosialisasi yang diadakan oleh lembaga pemerintah seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, dan sebagainya. Sedangkan pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang pada tahap ini mulai mempersiapkan segala sesuatu yang

dibutuhkan dalam implementasi Program Rehabilitasi Ekosistem Mangrove seperti pemilihan bibit mangrove, pemilihan lahan, mempersiapkan pagu anggaran serta persiapan masyarakat seperti pelatihan mengenai pengelolaan mangrove, cara penanaman dan pemeliharaan mangrove dan lain- lain. Tahap selanjutnya, masyarakat sudah mulai menjadi bagian dari Program Rehabilitasi Ekosistem Mangrove dengan membentuk kelompok- kelompok masyarakat dan secara aktif memantau, mengikuti dan mengkritisi kegiatan- kegiatan yang dilakukan oleh lembaga- lembaga pemerintah dan secara aktif bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat dan instansi swasta dan BUMN yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Sedangkan pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang mulai mengerjakan tugas- tugas yang diberikan secara runtut dan rutin mulai dari penanaman mangrove, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap lahan mangrove. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan sesuai situasi dan kondisi.

2. Faktor- Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Rehabilitasi Ekosistem Mangrove di Kecamatan Tugu Kota Semarang

Tabel 1. Faktor- Faktor yang Mendukung dan Menghambat Implementasi Program Rehabilitasi Ekosistem Mangrove di Kecamatan Tugu Kota Semarang

| No. | Faktor yang Mendukung | Faktor yang Menghambat |
|------------|--|--|
| 1. | Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang memiliki tugas pokok dan fungsi secara jelas dalam Program Rehabilitasi Ekosistem Mangrove. | Kelurahan- kelurahan di wilayah pesisir Kota Semarang tidak memiliki tugas dan fungsi yang jelas dalam melaksanakan program ini. |
| 2. | Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang belum memiliki SOP untuk menjalankan program ini. Kelurahan menjalankan program ini sesuai dengan peraturan pemerintah dan kebijakan DKP Kota Semarang. | Belum ada koordinasi yang jelas antara DKP Kota Semarang dengan kelurahan menyangkut dengan program ini. |
| 3. | Kerjasama dan koordinasi DKP Kota Semarang dengan instansi lain, kelompok masyarakat, LSM, akademisi dan masyarakat dilakukan melalui forum KKMKS. | Pengawasan setiap harinya dilakukan oleh kelompok masyarakat. Kelurahan juga menyerakan pengawasan kepada masyarakat. |
| 4. | Implementor dalam menyapaikan informasi tidak hanya melakukan secara lisan, namun juga melakukan praktik ke lapangan. Komunikasi telah | Media komunikasi masih menggunakan media yang konvensional seperti lisan dalam pembinaan, sosialisasi, workshop, |

| | | |
|-----|--|---|
| | terjalin dengan baik dengan masyarakat sehingga ada pertukaran informasi antara masyarakat dengan implementor. | maupun musyawarah. Selain itu, media yang digunakan antara lain leaflet, pamphlet, poster, dan brosur. |
| 5. | Materi informasi yang disampaikan kepada masyarakat antara lain potensi laut dan pesisir, kerusakan pesisir dan laut, rehabilitasi pesisir dan laut, pengelolaan sampah. Masyarakat menanggapi informasi tersebut dengan positif dan menaljan apa yang telah diinformasikan. | Masih ada pegawai di DKP yang tidak memiliki latar belakang ilmu kelautan dan perikanan. |
| 6. | Informasi yang disampaikan sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan keadaan di lapangan. Informasi disampaikan kepada masyarakat dengan dalam porsi yang sederhana disesuaikan dengan kemampuan masyarakatnya. | Jumlah personil yang ada di DKP maupun di kelurahan belum memadai dan terbatas dalam menjalankan program ini. |
| 7. | Informasi yang disampaikan dengan konsisten dengan keadaan dan tujuan serta disampaikan secara terus menerus dan rutin. | Belum ada informasi mengenai tata cara pelaksanaan. |
| 8. | Wewenang yang dimiliki petugas didapat dari tupoksi serta wewenang dalam melaksanakan yang sesuai tupoksi dan menolak kegiatan yang tidak sesuai tupoksi. | Kualitas dan kuantitas fasilitas dalam program ini berupa anggaran dimana masih sangat terbatas untuk pengadaan bibit mangrove, pembuatan sabuk pantai dan APO, lahan dan pembinaan masyarakat. |
| 9. | Komitmen implementor dapat terlihat dari berbagai macam kegiatan yang diselenggarakan dan diikuti. Menurut masyarakat komitmen implementor saat ini sudah bagus | petugas pelaksana di kelurahan pengawasan dan kunjungan dilakukan pada moment tertentu saja. |
| 10. | Tingkat penerimaan implementor dan masyarakat dalam program ini | Kejujuran petugas dalam transparansi anggaran kepada |

| | | |
|-----|---|--------------------------|
| | mendapat respon positif terbukti dari harapan mereka akan keberlanjutan program ini. | masyarakat masih kurang. |
| 11. | Petugas dalam bidang Pengelolaan Kelautan dan Wilayah Pesisir setahun tidak terhitung dalam melaksanakan program ini. | |

F. Penutup

Simpulan

Program Rehabilitasi Ekosistem Mangrove di Kecamatan Tugu Kota Semarang belum berjalan dengan baik dan dinilai belum berhasil. Hal ini dikarenakan masih banyak wilayah pesisir di Kota Semarang yang belum direhabilitasi ekosistem mangrovenya serta masih banyak wilayah yang mengalami abrasi. Faktor utama penghambat keberhasilan program dalam melakukan rehabilitasi di pesisir Kecamatan Tugu adalah kurangnya sumber daya finansial yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang juga kelurahan- kelurahan di Kecamatan Tugu terhadap ekosistem mangrove masih sangat kurang karena petugas yang dimiliki sangat terbatas untuk bisa melakukan pengawasan secara berkala. Koordinasi antar lembaga yang memiliki kepentingan dan kepedulian dalam Program Rehabilitasi Ekosistem Mangrove sudah baik dimana terdapat Forum KKMKS (Kelompok Kerja Mangrove Kota Semarang) sebagai wadah untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dalam program ini.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka diperlukan rekomendasi langkah- langkah yang mungkin diambil untuk mencapai keberhasilan dalam Program Rehabilitasi Ekosistem Mangrove di Kecamatan Tugu Kota Semarang. Langkah- langkah yang mungkin diambil adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan finansial yang dialami oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang dapat diatasi dengan mengadakan kerjasama dengan perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki dana Corporate Service Responsibility (CSR) untuk pengadaan bibit mangrove, pembangunan alat pemecah ombak dan pembangunan sabuk pantai.

2. Peningkatan komitmen dan keseriusan Pemerintah Kota Semarang dalam Program Rehabilitasi Ekosistem Mangrove dengan melakukan beberapa upaya seperti peningkatan anggaran untuk program ini serta mengadakan kampanye peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk menjaga dan ikut melakukan rehabilitasi ekosistem mangrove di Kota Semarang.

3. Pembentukan kelompok masyarakat di wilayah pesisir Kota Semarang yang diberikana pelatihan untuk memelihara dan mengaawasi eksositem mangrove dari ancaman- ancaman 3 W (*Wideng, Wedhus, Wong*) yang dapat merusak keberadaan ekosistem mangrove.

4. Meningkatkan fungsi dan manfaat yang dimiliki oleh Forum KKMKS untuk mendorong keberhasilan program ini. Forum KKMKS dapat digunakan sebagai media untuk melakukan koordinasi dan kerjasama antar lembaga pemerintah dalam program ini seperti pembuatan *Standar Oprasional Prosedur (SOP)* yang digunakan bersama- sama dalam program ini, melakukan koordinasi untuk memecahkan masalah seperti belum tersedianya lahan untuk melakukan rehabilitasi di Kota Semarang.

Daftar Pustaka

Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media

Kordi K, M. Ghufran H. 2012. *Ekosistem Mangrove: Potensi, Fungsi dan Pengelolaan*. Jakarta: Rineka Cipta

Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya

Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo

Subarsono. 2010. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogayakarta: Pustaka Pelajar

Tim Penyusun Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang. 2010. *Laporan Akhir: Pemetaan Potensi, Kerusakan, Model Rehabilitasi Kawasan Pesisir Kota Semarang*. Semarang: Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Semarang

Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implemenrasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara